

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjalankan sistem perpajakan di Indonesia merupakan proses yang kompleks, karena masyarakat perlu memiliki pemahaman tentang peraturan pajak dan prosedur perhitungannya agar dapat menghindari kesalahan dan potensi pelanggaran dalam menghitung dan membayar pajak. Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan regulasi perpajakan yang mengatur berbagai aspek terkait, termasuk siapa yang dikenakan pajak, apa yang menjadi objek pajak, bagaimana dasar pengenaan pajak ditentukan, serta langkah-langkah perhitungan pajak yang harus diikuti (Siti Resmi, 2011).

Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan, khususnya dalam kategori pajak daerah. BPHTB dikenakan atas setiap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, baik melalui jual beli, hibah, warisan, atau bentuk peralihan hak lainnya. Mengingat pentingnya BPHTB bagi pendapatan daerah, mekanisme perhitungan dan penyetoran pajak ini menjadi aspek krusial dalam administrasi perpajakan.

Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah yang digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. BPHTB dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pengelolaannya melibatkan perhitungan yang akurat serta penyetoran yang tepat waktu. Mekanisme ini memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai peraturan perpajakan serta prosedur administratif yang berlaku. (Arbayah, 2017)

PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, sebagai lembaga keuangan yang berperan dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan, memiliki tanggung jawab penting dalam perhitungan dan penyetoran BPHTB. Bank ini seringkali terlibat dalam transaksi yang melibatkan perolehan hak atas tanah dan bangunan, baik dalam konteks pembelian maupun pengalihan aset. Oleh karena itu, memahami mekanisme perhitungan dan penyetoran BPHTB di PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan serta menghindari potensi sanksi atau masalah hukum.

Namun, pelaksanaan perhitungan dan penyetoran BPHTB seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk ketidakpastian dalam penilaian nilai tanah dan bangunan, serta kompleksitas prosedur administratif yang harus diikuti. Selain itu, pemahaman yang kurang

tentang peraturan perpajakan yang berlaku dapat mengakibatkan kesalahan dalam perhitungan atau keterlambatan dalam penyetoran.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mekanisme perhitungan dan penyetoran BPHTB di PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi. Dengan memahami prosedur yang diterapkan dan tantangan yang dihadapi, diharapkan dapat diidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses ini. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi lembaga lain dalam pengelolaan BPHTB dan meningkatkan kepatuhan perpajakan secara keseluruhan

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, pokok permasalahan dalam laporan ini meliputi dua hal berikut:

- 2 Bagaimana perhitungan dan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi?
- 3 Bagaimana Sistem penyetoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penulis ini adalah:

1. Untuk mengetahui perhitungan dan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi.
2. untuk mengetahui perhitungan dan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi

1.4. Manfaat Penelitian

Tujuan dari penyusunan Laporan Tugas Akhir di Bank Pembangunan Daerah Jambi adalah untuk meningkatkan pemahaman para karyawan serta berperan dalam membagikan pengetahuan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi atau Bank 9 Jambi. Laporan ini

juga berperan sebagai sumber informasi bagi karyawan Bank Pembangunan Daerah Jambi mengenai perhitungan dan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan untuk wajib pajak

1.5. Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendetail tentang mekanisme perhitungan dan penyetoran BPHTB di PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi. Fokus utama penelitian adalah menjelaskan proses yang berlangsung serta aturan-aturan yang terkait dengan pelaksanaan BPHTB di lingkungan bank tersebut.

1.6. Waktu dan Lokasi Magang

Kegiatan praktek lapangan dimulai dari tanggal 20 Februari 2024 dan berakhir pada tanggal 3 Mei 2024 di Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi yang berlokasi di Kantor Wali Kota Jambi.

1.7. Sistematika Penulisan

Pembuatan laporan praktik kerja lapangan ini memuat sistematika yang runtut sesuai dengan aturan penulisan laporan yang ada, dimana tujuannya agar apa yang disampaikan oleh penulis mampu di terima baik oleh pembaca. Berikut sistematikanya:

BAB I: PENDAHULUAN Dalam bab ini penulis memberikan penjelasan singkat mengenai sejarah seleksi, judul, rumusan masalah, tujuan kajian, keunggulan, dan sistematika penelitian.

BAB II: LANDASAN TEORI Untuk menjelaskan rumusan masalah yang selanjutnya diuraikan pada bab selanjutnya, penulis membahas teori fundamental atau konseptual yang dihubungkan 5 dengan judul hasil praktik magang pada bab ini.

BAB III PEMBAHASAN Penulis memberikan gambaran umum mengenai PT. Bank Pembangunan Daerah pada bab pembahasan ini, mulai dari asal-usul dan perkembangannya hingga mekanisme perhitungan dan penyetoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN Penulis menyimpulkan penelitian pada bab terakhir ini dengan temuan penelitian dan saran yang dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.